

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

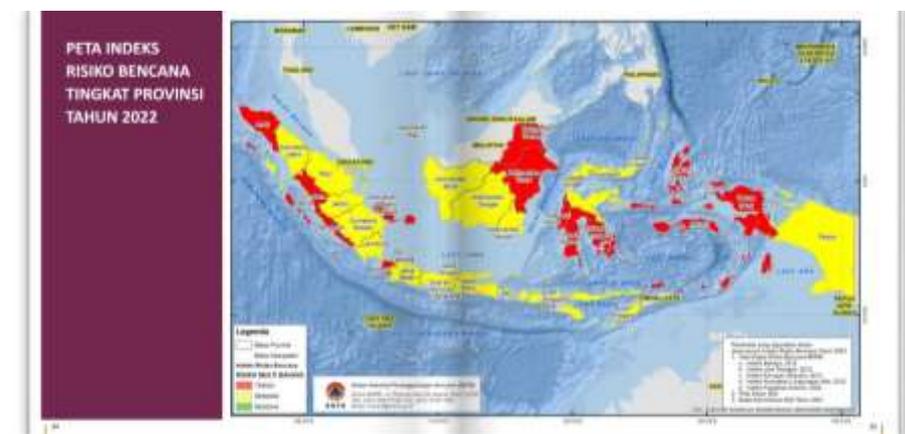
Negara Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam, cuaca, serta musim yang cukup beragam. Indonesia dikaruniai dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bencana di Indonesia sangat berkaitan dengan adanya perubahan iklim. Sehingga memunculkan 3 jenis bencana, yakni bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh dari bencana alam geologi adalah seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya adalah seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir dan sebagainya. Lalu terakhir ada bencana alam ekstra terestrial, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa seperti badai meteor, badai matahari dan sebagainya (BPBD Kab. Bogor).

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana) menyatakan bahwa :

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.”

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pengaruh vulkanisme dan

tektonisme menduduki peringkat ke-40 (risiko tinggi) diantara 181 negara rentan bencana (The World Risk Index, 2020). Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor adalah bencana yang paling sering terjadi dan berpotensi mengakibatkan adanya kerusakan pada aset di Indonesia. Kerugian ini membuat Indonesia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pada, periode 2000-2016 terdapat beban rata-rata Rp 22,8 triliun per tahun untuk menanggulangi bencana alam maupun non alam (Kemenkeu, 2020).



Gambar 1. 1 Peta Indeks Risiko Bencana di Indonesia Tahun 2022

Sumber : BNPB (2022)

Bencana tidak hanya merenggut nyawa manusia, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, misalnya hilangnya mata pencaharian dan harta benda. Sebagai contoh, akibat banjir dapat kehilangan rumah dan barang-barang berharga yang ditinggali selama bertahun-tahun. Bencana juga menyebabkan rusaknya fasilitas umum seperti jembatan, jalan, dan sarana komunikasi. Dampak lain yang dihadapi masyarakat lokal adalah hilangnya pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang mereka miliki juga hilang dan rusak. Dalam kurun waktu 2015-2019 Indonesia masuk dalam kategori negara

dengan potensi terjadinya bencana alam yang menduduki peringkat 35 secara global (Nurjanah & Apriliani, 2021).

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh BPBD Kabupaten Bogor dalam berita media *online* nasional.sindonews yaitu :

JAKARTA – Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.945 kali bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2022. “Sampai tanggal 2 Juli 2022 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.945 kejadian,” tulis laporan BNPB melalui akun twitternya @BNPB_Indonesia, dikutip Senin (4/7/2022). Adapun kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Rinciannya, bencana banjir terjadi sebanyak 756 kali, tanah longsor 377 kali, cuaca ekstrem 694 kali. Sementara itu gempa bumi terjadi sebanyak 12 kali, kebakaran hutan dan lahan 94 kali dan gelombang pasang dan abrasi 11 kali. “Dari dampak bencana alam tersebut menimbulkan korban meninggal dunia 104 jiwa, hilang 15 jiwa, 692 luka-luka dan terdampak dan mengungsi 2.433.952 jiwa,” tutup laporan itu. (Sumber : <https://nasional.sindonews.com/read/816527/15/bencana-alam-2022-104-orang-meninggal-hampir-25-juta-jiwa-mengungsi-1656896877>). Diakses pada 24 September 2023.



Gambar 1. 2 Indografik Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2022 (BNPB)
Sumber : BNPB (2022)

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang tahun 2022 terdapat 3.544 alam di Indonesia dengan jenis bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir, yakni 1.531 kejadian. Jumlah ini setara 43,2 % dari total kejadian bencana nasional. Disusul dengan 1.068 peristiwa cuaca

ekstrem, 634 tanah longsor, 252 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 26 gelombang pasang/abrasi, 28 gempa bumi, serta 4 peristiwa kekeringan (Gambar 1.2).

Lebih lanjut penjelasan kerugian akibat bencana alam secara nasional akan dijelaskan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Kerugian Bencana Alam di Indonesia Periode 1 Januari – 31 Desember 2022

No.	Dampak Bencana Alam	Jumlah
1.	Meninggal dunia	858
2.	Hilang	37
3.	Menderita & mengungsi	6.144.534
4.	Luka-luka	8.733
5.	Rumah rusak	95.403
6.	Fasilitas rusak	1.983

Sumber : Tabel diolah penulis, Oktober 2023

Berdasarkan BNPB, di Indonesia, tiga pilar menangani bencana adalah pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Lembaga memainkan peran penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Banyak lembaga-lembaga dengan karakteristik unik yang sesuai dengan sejarah organisasinya terlibat dengan penanggulangan bencana, seperti Sampoerna Rescue, Artha Graha Peduli, dan Disaster Resources Partnership (DRP), dan lain-lain. Lembaga juga dapat menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR, untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan meringankan penderitaan masyarakat yang terkena dampak bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 12/2014), yang dibuat sesuai dengan

Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), menetapkan keterlibatan lembaga dalam penanggulangan bencana. Perka BNPB No. 12/2014 ditetapkan oleh Syamsul Maarif, Kepala BNPB, pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta.

Lembaga dapat didefinisikan sebagai setiap badan hukum, yang mana itu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, peran serta didefinisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi dalam lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana. Tujuan Perka BNPB No. 12/2014 adalah untuk mendukung peningkatan upaya pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang efektif, berhasil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga harus berkolaborasi dengan BNPB atau BPBD dan mengumumkan rencana kegiatan tersebut kepada masyarakat di wilayah kerja. Lembaga bekerja sama dengan komunitas di wilayah kerja, terutama mereka yang menerima manfaat program kerja. Pembelajaran bersama ini dapat dilakukan melalui forum seminar, bimbingan teknis, dan pendidikan dan pelatihan. Lembaga harus berusaha untuk mengalihkan kepemilikan aset dari operasi penanggulangan bencana melalui proses hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika mereka melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perka BNPB No. 12/2014 ini, mereka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda telah memperingatkan adanya muncul potensi fenomena hidrometologi di beberapa daerah di Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh Taufiq Hermawan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda dalam pers, yaitu :

Jatim.antaranews.com – “Ia mengatakan hasil analisis dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur terkini menunjukkan adanya pola konvergensi serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan. Aktifnya fenomena gelombang atmosfer Equatorial Rossby, serta suhu muka laut di perairan Jawa Timur masih hangat dengan anomali antara +0.5 sampai dengan +2.5 derajat celsius sehingga pasokan uap air akan semakin banyak di atmosfer,” ucapnya. Kondisi tersebut, kata dia, mempengaruhi pembentukan awan Cumulonimbus yang semakin intens dan dapat mengakibatkan cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung dan hujan es. Beberapa wilayah yang patut diwaspadai memiliki potensi cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, hujan es maupun tanah longsor. ia merinci sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kabupaten dan Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten dan Kota Kediri. Berikutnya, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Malang, Batu, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. "Masyarakat diimbau untuk melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran irigasi atau sungai-sungai, memangkas dahan dan ranting pohon yang rapuh atau lapuk, menertibkan baliho semipermanen, serta selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi," tuturnya.” (Sumber : <https://jatim.antaranews.com/amp/berita/646321/bmkg-juanda-sebut-jatim-berpotensi-terjadi-bencana-hidrometeorologi>). Diakses pada 13 September 2023.

Berdasarkan berita di atas, bahwa di tiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi terjadinya bencana alam, khususnya banjir. Menurut data bencana pada BPBD Jatim, berkaitan dengan provinsi yang paling

sering mengalami bencana alam pada 2022, Ahdiat (2022) melaporkan bahwa ada 10 provinsi dengan bencana alam terbanyak pada periode 1 Januari sampai 1 November 2022, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sumatra Utara. Menurut Annur (2023) bencana yang paling tinggi frekuensinya adalah di Pulau Jawa yang mencakup Jawa Barat dengan 823 kejadian, kemudian diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 486 dan 400 kejadian.

Dampak dari potensi bencana di Jawa Timur tersebut mengakibatkan 107 bencana banjir yang terjadi menyebabkan 11 orang meninggal dunia, 32 orang luka-luka, 3.554 rumah rusak, dan jumlah warga terdampak mencapai 101.131 kepala keluarga (KK). Bencana hidrometeorologi tersebut menimbulkan berbagai dampak, antara lain, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial meliputi hilangnya mata pencaharian dan trauma bagi masyarakat terdampak bencana. Dampak ekonomi yaitu terganggunya kegiatan perekonomian dan terputusnya alur perekonomian.

Salah satu wilayah yang berpotensi wilayah rawan terjadinya banjir ialah Kabupaten Jombang. Hampir seluruh daerah kecamatan di Kabupaten Jombang adalah wilayah rawan bencana banjir yang datang setiap tahun. Hampir seluruh daerah kecamatan di Kabupaten Jombang menjadi daerah waspada bencana banjir dengan tingkat kerawanan banjir rendah hingga tinggi. Banjir di Kabupaten Jombang akibat intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan Sungai Catak Banteng, Sungai Pancir, dan Sungai Gunting meluap dengan tinggi muka air (TMA) $\pm 100-150$ cm (BPBD Jatim 2020). Dalam media *online* Berita Nusantara

bahwa BPBD Kabupaten Jombang siaga banjir, merespon meluapnya debit air Kali Gunting di daerah terdampak yang menyatakan bahwa :

“Hingga Jumat pagi (11/03/2022), petugas BPBD dan relawan berada di lokasi pengungsian untuk membantu mengevakuasi warga yang rumahnya terdampak banjir. Petugas juga sudah mulai mendirikan dapur umum untuk membantu kebutuhan makan dan minum warga korban banjir. “Aktivitas warga lumpuh sampai saat ini banjir masih tinggi dan merendam rumah-rumah penduduk,” Ungkap Supervisor Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, Steve Maria.”

(Sumber: https://m.kbr.id/nusantara/03-2022/banjir_setinggi_3_meter_di_jombang_ribuan_orang_mengungsi/107854.html) Diakses pada 14 September 2023.

BPBD Kabupaten Jombang telah mengupayakan hal tersebut, karena debit air sungai yang meluap semakin tidak terkontrol disebabkan adanya intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu Kali Gunting naik sangat cepat dan signifikan, sehingga mengakibatkan jalan lingkungan Desa Kademangan dan sekitarnya tergenang air setinggi hampir setiap rumah-rumah warga serta menggenangi area persawahan. BPBD Kabupaten Jombang terus melaksanakan koordinasi untuk monitoring serta pendataan lebih lanjut (Ramadan, 2021).

Menurut BPBD Kabupaten Jombang (2022) menjelaskan bahwa secara geografis Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yaitu wilayah salah satu paling dekat dengan Kali Gunting, ketika terjadi hujan deras maka hampir semua wilayah di Kecamatan Mojoagung waspada terjadi rawan banjir. Jumlah debit sungai Kali Gunting cenderung sangat tinggi, sedangkan drainase serta kontur bawah sungai terbilang buruk, sehingga menyebabkan aliran debit yang besar tidak dapat berjalan dengan semestinya, dengan begitu air sungai meluap dan menggenangi sejumlah wilayah yang berada di sekitaran Kali Gunting, seperti halnya akses jalan umum, lahan pertanian dan perkebunan, serta pemukiman

warga. Hal di atas sesuai dengan berita yang dimuat dalam detik.com, yakni :

Jombang (detik.com) “Banjir melanda 8 desa di Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Banjir kali ini akibat meluapnya Sungai Gunting, Pancir dan Catak Banteng setelah hujan selama beberapa jam. Personel Pusdalops BPBD Kabupaten Jombang Bagus Kurniawan menjelaskan banjir yang merendam rumah-rumah penduduk di Dusun Kebondalem, Desa Kademangan mencapai 60-70 cm. Ketinggian banjir di jalan-jalan kampung 1-2 meter. Banjir di desa ini karena melubernya air dari Sungai Pancir dan Catak Banteng. Data yang dirilis BPBD Kabupaten Jombang pada Kamis (2/3/2023) pukul 21.00 WIB, banjir melanda 5 desa di Kecamatan Mojoagung dan 3 desa di Kecamatan Mojowarno. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Pancir, Gunting dan Catak Banteng. Ketinggian air di Dusun Kebondalem dan Pekunden di Desa Kademangan sempat mencapai 80-150 cm di permukiman penduduk dan 180 cm di jalan kampung. Di Dusun Sanan, Desa Mojotrisno sekitar 80 cm, di Desa Mancilan hanya di jalan sekitar 20 cm, di Dusun Kagulan, Desa Janti sekitar 40 cm, di Dusun Betek Utara, Desa Betek sekitar 30 cm” Sumber : (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6598238/3-sungai-di-jombang-meluap-sebabkan-8-desa-diterjang-banjir/amp>) Diakses pada 13 September 2023.

Berita di atas menjelaskan bahwa terdapat 2 kecamatan di Kabupaten Jombang yang masuk kategori dalam zona merah banjir, diantaranya adalah Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Mojoagung. Besarnya potensi rawan banjir terhadap kecamatan tersebut dikarenakan keberadaan beberapa sungai di sekitarnya, seperti Sungai Pancir, Gunting, dan Catak Banteng. Berita tersebut didukung dengan adanya penjelasan dari pihak BPBD Kabupaten Jombang (2021) yaitu warga Kecamatan Mojoagung merasakan kekhawatiran yang berlebihan, dikarenakan banjir pada tahun 2021 sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terjadinya hujan yang sangat deras yaitu terjadi semalaman tanpa henti menyebabkan Kali Gunting tidak mampu lagi menahan debit air hujan yang semakin besar, dan akhirnya air sungai tersebut meluap ke permukiman warga. Mengenai hal tersebut para warga memiliki keterbatasan kemampuan guna

menanggapi atau merespon serta menangani bencana alam terkait pemahaman masyarakat itu sendiri pada terjadinya bencana dan cara mengurangi risiko yang cukup rendah (Amalia & Sari, 2018).

Tabel 1. 2 Angka Bencana Banjir dan Penduduk di Kecamatan Mojoagung Tahun 2020

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Bencana Banjir (kali)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Kedunglumpang	1	5.457
2.	Dukuh Mojo	3	6.904
3.	Karangwinongan	1	3.778
4.	Kademangan	9	5.458
5.	Janti	1	3.570
6.	Tejo	1	6.201
7.	Gambiran	-	2.988
8.	Kauman	2	1.784
9.	Mojotrisno	3	4.391
10.	Tanggalrejo	1	7.368
11.	Dukuhdimoro	-	4.578
12.	Miagan	2	3.833
13.	Mancilan	2	8.697
14.	Betek	1	5.298
15.	Karobelah	2	4.929
16.	Murukan	2	3.619
17.	Johowinong	-	4.636
18.	Seketi	-	1.268

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2022 Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa angka kejadian bencana banjir di desa/kelurahan di Kecamatan Mojoagung di tahun 2020 tertinggi adalah di Desa Kademangan. Desa Kademangan merupakan salah satu desa yang masuk dalam zona merah banjir karena terlalu seringnya terdampak banjir parah dibandingkan desa yang lain, oleh karena itu Desa Kademangan inilah yang sangat sering mengalami kerugian secara *materiil* maupun *non-materiil*. Pada kondisi seperti itu warga Desa

Kademangan begitu memprihatinkan, mereka mau tidak mau hidup secara berdampingan dengan bencana, aktivitas sehari-hari pun begitu tidak nyaman dan sangat terganggu. Hal itu menyebabkan sebagian besar kegiatan di Desa Kademangan lumpuh, seperti bekerja, sekolah, dan kegiatan di luar rumah lainnya.

Tabel 1. 3 Keberadaan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mojoagung 2020

No.	Desa/ Kelurahan	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Perlengkapan Keselamatan
1.	Kedunglumpang	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Dukuh Mojo	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Karangwinongan	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Kademangan	Ada	Tidak Ada
5.	Janti	Ada	Ada
6.	Tejo	Tidak Ada	Tidak Ada
7.	Gambiran	Ada	Tidak Ada
8.	Kauman	Tidak Ada	Tidak Ada
9.	Mojotrisno	Tidak Ada	Tidak Ada
10.	Tanggalrejo	Tidak Ada	Tidak Ada
11.	Dukuhdimoro	Tidak Ada	Tidak Ada
12.	Miagan	Tidak Ada	Tidak Ada
13.	Mancilan	Tidak Ada	Tidak Ada
14.	Betek	Tidak Ada	Tidak Ada
15.	Karobelah	Tidak Ada	Tidak Ada
17.	Murukan	Tidak Ada	Tidak Ada
18.	Johowinong	Tidak Ada	Tidak Ada
19.	Seketi	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Jombang 2022.

Berdasarkan data tabel tersebut menjabarkan bahwa di Desa Kademangan dari segi fasilitas maupun sarana dan prasarana untuk mendukung keselamatan para warganya masih kurang, akan tetapi telah dilengkapi dengan adanya peringatan dini pada bencana alam, serta di Desa Kademangan penanganan mitigasi juga masih rendah, antisipasi bencana alam melalui jalur evakuasi serta rambu-rambu

di tiap desa hanya terdapat satu di salah satu desa tersebut. Penormalisasian, pembuatan, serta perawatan bantaran sungai pun juga belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam upaya pengantisipasi serta perlengkapan keselamatan dan peringatan dini harus sudah tersedia guna keselamatan diri/individu secara tepat dan cepat, yang mana hal tersebut agar masyarakat dimudahkan dalam upaya penyelamatan diri serta guna mengantisipasi terjadinya fenomena bencana alam yang dapat muncul sewaktu-waktu di kemudian hari, serta untuk berlindung di tempat yang lebih aman dan nyaman.

Tiap desa-desa yang setiap tahunnya terjadi bencana banjir diwajibkan mempunyai fasilitas dan kelengkapan yang diperlukan untuk percepatan penanganan bencana khususnya di Desa Kademangan dikarenakan terlalu sering terkena bencana banjir. Hal tersebut didasarkan pada data BPS yang menjelaskan bahwa Desa Kademangan merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Mojoagung yang terdampak banjir dengan kondisi terparah se-Kabupaten Jombang. Akan tetapi, warga Desa Kademangan masih banyak yang beranggapan bahwa semua bencana yang terjadi khususnya bencana banjir merupakan tanggung jawab seluruhnya terhadap petugas bencana. Dari sini telah menunjukkan bahwa kondisi yang tidak ideal. Padahal, tim *Search And Rescue* (SAR)/tim penolong bukanlah satu-satunya komponen yang harus menjadi garda terdepan untuk penolong di segala musibah atau keadaan darurat, akan tetapi dibutuhkan juga peran serta masyarakat yang ikut berkontribusi di dalamnya (Rosmi et al., 2020). Pemahaman tentang mitigasi bencana serta pengetahuan tentang kejadian alam yang rawan

menjadi bencana juga perlu dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat pada wilayah terdampak juga harus memiliki implikasi langsung dalam menghadapi bencana. Karena bagaimanapun sangat penting adanya partisipasi public serta guna meringankan pengurangan dalam pengurangan risiko bencana maka dalam hal ini masyarakat juga perlu untuk meningkatkan kesadaran (Safitri et al., 2020).

Banyaknya kecelakaan fatal yang terjadi saat terjadi bencana disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana. Menurut Paramasti (2011:116), masyarakat hendaknya mengetahui jenis-jenis fenomena alam penyebab bencana, ciri-cirinya dan tindakan penanggulangan bencana, serta mampu mengambil sikap untuk mencegah fenomena tersebut, salah satunya dapat dengan evakuasi perbekalan dan tempat berlindung ke lokasi yang lebih aman.

Dampak dari bencana banjir di Desa Kademangan tersebut mengakibatkan 9 bencana banjir yang terjadi menyebabkan 2 orang meninggal dunia, beberapa area pertanian tanaman padi dan tebu serta tempat pemukiman warga dan halaman serta pemukiman penduduk tergenang air dengan ketinggian bervariasi antara 20 cm s/d 70, 50 hektare lahan pertanian rusak, tanggul Sungai Pancir putus, longsornya tanggul sungai sepanjang 7x5 m, dan jumlah warga terdampak mencapai 3.392 kepala keluarga (KK) atau 9.267 jiwa. Bencana hidrometeorologi tersebut menimbulkan berbagai dampak, antara lain, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial meliputi hilangnya mata pencaharian dan trauma bagi masyarakat terdampak bencana. Dampak ekonomi yaitu terganggunya kegiatan perekonomian dan terputusnya alur perekonomian.

Untuk meminimalisir kerugian, di sini masyarakat juga dilibatkan yang diharuskan mempunyai *skill* guna mengatasi kerentanan yang terjadi sehingga masyarakat sebagai objek utama saat terjadinya bencana alam. Hal tersebut dapat teralisasi jika masyarakat memiliki rencana untuk mitigasi bencana, serta memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, dan pemahaman seperti apa yang harus dilakukan sebelum, saat, serta sesudah bencana terjadi. Sehingga sangat penting untuk menyebarkan atau menanamkan pemahaman tersebut sehingga masyarakat dapat mengurangi kerugian akibat bencana alam (Safitri et al., 2020). Mengingat bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama semua elemen masyarakat, bukan hanya perkara yang hanya ditanggung oleh pemerintah saja (Nurjanah & Apriliani, 2021).

Partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakat di sini tidak hanya menjadi objek/korban dari pengelolaan bencana, akan tetapi mereka juga menjadi pelaku dari manajemen bencana, hal tersebut dijelaskan menurut perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi risiko bencana di daerah yang terkena dampak (Khaira., et al 2020). Sehubungan dengan aspek kerja sama yang dinamis, tampaknya penanganan banjir di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang masih bersifat spasial. Semua pihak yang bertanggung jawab terkesan berjalan sendirian. Ini menunjukkan bahwa program tidak sinkronis, yang akan memadukan semua pihak terkait dalam setiap tindakan penanggulangan banjir. Sebaliknya, partisipasi masyarakat sangat rendah dalam mengatasi situasi tanggap darurat bencana yang memerlukan

evakuasi masyarakat.

Dibutuhkan konsep kerja sama antar pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dan bisnis dalam menangani banjir. Hal ini berlaku untuk pemerintah Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan pemerintah daerah lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi yang terbentuk inilah antara sesama elemen masyarakat di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dapat diteliti dengan menggunakan Teori *Hexahelix*.

Untuk menanggulangi banjir, pemerintah Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang harus terus bersiap dan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk melibatkan masyarakat dan lembaga dalam rangka kerja sama pemerintahan. Karena para *stakeholder* seringkali bekerja sendirian dalam menangani bencana karena kurangnya dukungan dari pihak masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa masyarakat seringkali bertindak sebagai pelanggan yang hanya mengharapkan pelayanan terbaik dari pemerintah, tanpa menyadari pentingnya fungsi dan partisipasi mereka (Danar, 2020).

Hexahelix adalah sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai peran atau pun kepentingan. Pemerintah adalah bagian dari *hexahelix*, yang memiliki tiga fungsi sekaligus, regulator dan kontrol. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan para pemangku kepentingan. Ini sejalan dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya yaitu masyarakat, dalam hal ini, masyarakat memiliki kekuatan dan peran untuk menggerakkan masyarakat lainnya. Akibatnya, masyarakat yang

dimaksud adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan lingkungannya. Ketua RT, ketua RW, dan organisasi masyarakat adalah contohnya. Pihak selanjutnya yang terlibat adalah media yang juga berfungsi sebagai pengganda. Media harus menyebarkan informasi dan mendidik masyarakat tentang kebencanaan. Pihak lain adalah akademisi, yang bekerja sebagai pencipta dan inovator. Akademisi sendiri memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah mengenai kemajuan dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya yakni sektor bisnis yang berfungsi sebagai penggerak dengan memberikan bantuan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bantuan keuangan lainnya. Lalu yang terakhir adalah hukum dan regulasi, regulasi yang dimaksud termasuk peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah (Zakaria et al., 2019).

Penulis memilih judul "*Hexahelix Analysis* dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang" karena penulis ingin mengetahui bagaimana pemerintah Desa Kademangan meningkatkan kemampuan masyarakatnya untuk menangani bencana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, menurut penelitian awal di lapangan, peneliti menemukan bahwa masyarakat sendiri masih memiliki pemahaman yang kurang tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat di lingkup keluarga dan lingkungan pada saat yang sama. Selain itu, penulis ingin mengetahui tentang peran dan kerjasama yang dimainkan oleh enam komponen *hexahelix*, yaitu pemerintah, komunitas masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, serta regulasi dan hukum dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan

kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana, terutama bencana banjir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penulis di atas, untuk menangani bencana ini, tidak cukup bergantung pada kemampuan pemerintah setempat. Selain itu, perlu ada partisipasi dari pihak lain, seperti akademisi, perusahaan atau bisnis lokal, media, masyarakat, dan juga regulasi dan hukum. Karena, seperti yang terjadi di Desa Kademangan, meskipun pemerintah tahu bagaimana mencegah bencana terjadi di wilayah setempat, jika pengetahuan masyarakat tidak ditingkatkan, upaya mitigasi bencana yang dilakukan di masyarakat akan menjadi kurang efektif. Ditambah lagi, kemungkinan bencana banjir di Desa Kademangan sangat tinggi, yang membuat dampak bencana semakin besar dan semakin parah. Maka diperoleh rumusan masalah yang hendak dikaji lebih jauh oleh penulis “Bagaimana peran 6 komponen *hexahelix* dalam upaya mitigasi bencana banjir di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan guna memperoleh wawasan lebih dalam mengenai peran antar 6 komponen *hexahelix* dalam upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Yang mana seharusnya mampu untuk menerapkan konsep *hexahelix* dalam mengurangi risiko potensi terjadinya bencana banjir.

1.4 Manfaat

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan baru khususnya terkait teori *hexahelix* dalam upaya mitigasi banjir di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang serta guna persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat menjadi tambahan data serta informasi yang berguna untuk sumbangsih pemikiran serta informasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

c. Bagi Instansi/Pemerintah/Dinas Lembaga Organisasi/Pihak Lainnya yang Terlibat

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi serta referensi guna sebagai bahan evaluasi dan sumbangan terhadap peningkatan IPTEK khususnya kepada pihak terkait pada penerapan *hexahelix* dalam mitigasi bencana banjir di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang guna dapat menyelesaikan permasalahan serta kekurangan yang ada.